

KERJASAMA ORGANISASI PEMUDA DENGAN PEMERINTAH KOTA

YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN SPIRIT

MULTIKULTURALISME

(Studi Kasus Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah

Indonesia-Yogyakarta)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ANDI NUR FIQHI UTAMI

20110520105

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2015**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara multikultural, kebhinekaan bangsa Indonesia menyatakan bahwa bangsa yang terdiri dari berbagai kelompok identitas etnis, ragam budaya, agama, dan bahasa (Nusantara, 2013). Keanekaragaman tersebut merupakan berkah bagi Indonesia, tetapi disisi lain keanekaragaman tersebut membawa konflik horizontal yang banyak terjadi di Indonesia (Nusantara, 2013). Konflik-konflik horizontal terjadi akibat ketidaksetaraan sosial yang meningkat di Indonesia (Fedyani, 2006).

Keanekaragaman di Indonesia dapat dilihat pada suatu daerah yang memiliki beragam budaya yaitu Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang sering dibicarakan banyak orang karena statusnya yang istimewa. Baik itu istimewa karena sistem pemerintahannya ataupun karena keunikannya. Predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata dan budaya (RPJPD Kota Yogyakarta, 2005). Selain itu Kota Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar karena keberadaan beberapa perguruan tinggi. Banyaknya pendatang dari berbagai daerah ke Yogyakarta. Kompas (2013) menyatakan pada Tahun 2013 tercatat sekitar 310.860 mahasiswa dari 33 provinsi di Indonesia belajar di Yogyakarta. Dari jumlah itu, 244.739 orang atau 78,7 persen adalah mahasiswa perantauan dari luar

daerah, dengan tujuan utama untuk menuntut ilmu sehingga menambah predikat sebagai “Indonesia Mini” (Kompas, 2013).

Struktur masyarakat Kota Yogyakarta, yang sebelumnya secara kultural relatif homogen, secara bertahap berkembang menjadi semakin heterogen atau semakin beranekaragam (Zudianto, 2008). Multikulturalisme di Kota Yogyakarta menjadi penting untuk dibicarakan, karena tiga alasan (Zudianto, 2008). Pertama, secara nasional muncul gejala melemahnya semangat kebangsaan yang menjadi komitmen kebersamaan kita sebagai satu bangsa (Zudianto, 2008). Menguatnya semangat kedaerahan dan politik sektarian untuk tujuan-tujuan politik pragmatis dan kepentingan jangka pendek semakin memprihatinkan (Zudianto, 2008). Kedua, masalah egoisme kelompok, baik itu kelompok etnis maupun kelompok agama dan politik, semakin hari menunjukkan perilaku yang menyimpang dari tatakrma demokrasi (Zudianto, 2008). Ketiga, kemajemukan Kota Yogyakarta tidak sampai memicu konflik antar kelompok dalam skala besar dan terbuka, baik konflik etnis maupun konflik agama sebagaimana banyak terjadi di daerah lain (Zudianto, 2008).

Pelajar dari bermacam-macam daerah secara otomatis membawa kebudayaan mereka masing-masing. Dengan keberadaan calon mahasiswa ini merupakan keuntungan bagi masyarakat Yogyakarta karena berbagai usaha dapat dibuka. Akan tetapi hal ini juga bisa menjadi kontradiksi dikarenakan kasus-kasus seperti perjudian, narkoba, tawuran, dan berbagai hal negatif lainnya. Kapoltabes Yogyakarta, Kompol Ahmad Dofiri (Suara Merdeka, 2010) menyatakan, selama 2009, angka kriminalitas di Kota Budaya mencapai 2.300 kasus, pelajar

menyumbang sebagian dari kasus tersebut. Hal ini jelas menjadi ancaman bagi masyarakat yang akan menimbulkan degradasi moral.

Disamping itu, keterbukaan Kota Yogyakarta terhadap kebudayaan luar ini menjadi sangat dinamis, maka segala budaya dari daerah lain berkumpul dan bercampur di Yogyakarta (Nusantara, 2013). Hal tersebut menciptakan Yogyakarta sebagai kota dengan tingkat pluralitas dan heterogenitas yang sangat tinggi dibandingkan kota-kota lainnya (Nusantara, 2013). Pluralitas dan heterogenitas di Yogyakarta dapat menjadi batu sandungan bagi keberlangsungan kehidupan di Yogyakarta, karena dapat menciptakan konflik horizontal (Nusantara, 2013). Ancaman begitu besar terjadi karena interaksi antara pelajar yang membawa kebiasaan yang negatif kemudian dianggap sebagai budaya bagi masyarakat lainnya (Nusantara, 2013). Seperti terjadi pada kasus Cebongan, tragedi berdarah yang menjadi isu etnis di masyarakat.

Kemudian untuk mereduksi timbulnya konflik, pemerintah memegang peranan yang sangat penting sebagai pengambil kebijakan (Zudianto, 2008). Untuk menghindari timbulnya kerusuhan di Yogyakarta, tentu pemerintah berperan cukup andil terutama pada strategi dan kebijakan pemerintah menyangkut pembinaan wawasan kebangsaan di Kota Yogyakarta. Kebijakan tersebut tercermin dalam semangat multikulturalisme yang terjalin di Yogyakarta. Zudianto (2008) menyatakan peran pemerintah untuk mewujudkan semangat multikulturalisme tersebut termaktub dalam visi-misi pengembangan Kota Yogyakarta kedepan sebagai kota yang multikultur dan toleran, tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis Daerah (RENSTRA). Dikutip dalam buku “*Kekuasaan Sebagai Wakaf Politik*” RPJPD tahun 2005-2025, menetapkan visi pembangunan kota Yogyakarta sebagai “kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan” (Zudianto, 2008).

Menurut Zudianto (2008), untuk mempertahankan karakter kota Yogyakarta yang multikultur perlu ada perumusan dan dukungan kebijakan politik yang jelas dan terukur untuk tiga bidang prioritas yakni, Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang memiliki kualitas terbaik; Yogyakarta sebagai kota pariwisata yang berbasis budaya, khususnya budaya jawa dalam konteks budaya nusantara; Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang unggul.

Maka dari itu perlu adanya aktor yang berperan untuk menjaga keteraturan dari interaksi antara budaya. Ancaman begitu besar tersebut menimbulkan reaksi oleh pelajar/mahasiswa yang menjunjung tinggi semangat nasionalisme. Tidak dapat dipungkiri terdapat organisasi yang keberadaanya dapat mereduksi konflik-konflik tersebut. IKPMD Indonesia-Yogyakarta adalah salah satu organisasi yang menyatukan berbagai macam budaya-budaya dari daerah.

Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah (IKPMD) Indonesia-Yogyakarta adalah sebuah organisasi independen (Nusantara, 2013). IKPMD Indonesia-Yogyakarta mengkoordinir seluruh IKPM provinsi se-Indonesia di Yogyakarta. Terbentuknya IKPM provinsi dikarenakan adanya yang menaungi perkumpulan mahasiswa dari berbagai daerah tersebut (Nusantara, 2013). Tak jarang pemerintah daerah yang memfasilitasi tempat tinggal yang dijadikan

sebagai asrama mahasiswa daerah (Nusantara, 2013). Di Yogyakarta terdapat 33 IKPM propinsi, dan lebih dari 300 IKPM Kabupaten (Nusantara, 2013). IKPMD Indonesia-Yogyakarta sebagai wadah pemersatu, meleburkan segala macam perbedaan, baik dalam kentalnya identitas kedaerahan, ataupun beragamnya ruang-ruang ideologi (Nusantara, 2013). Dimana terdapat berbagai macam kultur dan budaya yang berbeda-beda, tetapi dapat disatukan kedalam satu organisasi. Berdasarkan data diatas, IKPMD Indonesia-Yogyakarta dapat dikatakan sebagai bentuk miniatur kemajemukan bangsa, seperti sebuah potret wajah Indonesia dari Sabang sampai Marauke.

Kehadiran pemerintah bertindak sebagai mesin tanpa bahan bakar apabila aktor didalamnya tidak ikut berperan (Zudianto, 2008). Aktor yang berperilaku adalah pelajar dan mahasiswa, jadi perlu adanya peran langsung dari pelajar dan mahasiswa tersebut. Dan dibutuhkan peran dari organisasi-organisasi kepemudaan. Berangkat dari hal inilah yang memotivasi penulis untuk meneliti mengenai kerjasama IKPMD Indonesia-Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan spirit multikulturalisme.

I.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada kerjasama IKPMD Indonesia-Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan spirit multikulturalisme. Juga akan diteliti upaya-upaya yang telah dilakukan IKPMD Indonesia-Yogyakarta dalam menjaga Kota Yogyakarta terhadap kultur yang dibawa oleh pelajar dan mahasiswa agar tidak ada gesekan satu sama lain. Sehubungan dengan hal tersebut masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah

bagaimana kerjasama IKPMD Indonesia-Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan spirit multikulturalisme?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan spirit multikulturalisme.
2. Mengidentifikasi keterlibatan IKPMD Indonesia-Yogyakarta pada kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan spirit multikulturalisme.
3. Memahami sebab-sebab keterlibatan IKPMD Indonesia-Yogyakarta pada kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta.

I.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

I.4.1. Manfaat Praktis

I.4.1.1 Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang saran bagi pemerintah Kota Yogyakarta, dalam mewujudkan spirit multikulturalisme agar tercipta masyarakat Kota Yogyakarta aman, damai, dan tentram.

I.4.1.2 Masyarakat

Memberikan pemahaman akan pentingnya pemahaman multikultural sehingga mampu mewujudkan semangat multikulturalisme di Kota Yogyakarta.

I.4.1.3 Peneliti

Mampu memahami dan mengidentifikasi serta mengimplementasikan ilmu, pengalaman, dan teori-teori yang diperoleh selama menempuh bangku kuliah yang telah ditempuh, untuk diabdikan kepada masyarakat dan negara.

I.4.2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi perkembangan teori tentang multikulturalisme sebagai ilmu sosiologi politik yang perlu diberi perhatian lebih pada perkembangan perpolitikan di Indonesia saat ini, dan khususnya pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal mewujudkan spirit multikulturalisme.